



### *Program for The Implementation and Evaluation of Educational Utilization in Yalimo District 2015*

## **Implementasi dan Evaluasi Kemanfaatan Program Pendidikan di Kabupaten Yalimo Tahun 2015**

**Ibrahim Kristofol Kendi**

Program Studi Administrasi Perkantoran FISIP Universitas Cendrawasih, Papua, Indonesia.

e-mail: [ibrahimkendi@ymail.com](mailto:ibrahimkendi@ymail.com)

#### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Implementation;  
Evaluation, Utilization;  
Educational Program;  
Yalimo.

**How to cite:**

Kendi, I.K, (2017).  
Implementasi dan Evaluasi  
Kemanfaatan Program  
Pendidikan di Kabupaten  
Yalimo Tahun 2015.  
Jurnal Ilmu Sosial (JIS)  
Papua. 4(1): 1 - 11.

#### ABSTRACT

*This study examines the implementation of programs and educational activities conducted by the Government of Yalimo Regency in 2015. This study used qualitative approach. Data were collected by using literature study and observation. Source of data derived from empirical facts and some notes (secondary data) i.e. documents RPJMD, LKPJ and Renstra SKPD Yalimo District Education Office. The result of data processing shows that the implementation of educational programs in Yalimo has not reached the expected point. There are some issues that are considered urgent to be implemented. Among others, the number of teachers is very minimal even at the level of kindergarten is not there at all, the availability of school facilities infrastructure, grant quantity, nine years complete program, complete illiteracy, competence of educators and strengthening of school management governance.*

### **1. Pendahuluan**

Ketertinggalan daerah terpencil di Indonesia hingga saat ini telah membelenggu dan mengisolasi dari perkembangan peradaban moderen. Dengan adanya Desentralisasi dan otonomi daerah telah merambah dan menjadi fenomena yang membangkitkan semangat daerah-daerah terpencil. Semangat tersebut mejadi modal spirit bagi daerah-daerah untuk mengembangkan daerah dalam rangka mengejar ketertinggalan. Semangat yang sama telah membangkitkan dan menyatukan aspirasi masyarakat Suku Yali untuk mengajukan pembentukan Daerah Otonomi Baru di daerah Pegunungan Tengah Papua. Melalui penetapan UU No 04 tanggal 21 Juni 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah meresmikan terbentuknya Kabupaten Yalimo sebagai daerah otonomi baru yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya.

Pasca pemekaran, pemerintahan Kabupaten Yalimo dipimpin oleh pejabat bupati yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan transisi sambil mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah definitif. Setelah melewati masa transisi periode 2008-2011, akhirnya Kabupaten Yalimo dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati definitif setelah Gubernur Barnabas Suebu, SH, melantik Bupati Er Dabi, S.Sos. dan Wakil Bupati Arkelas Asso, S.Sos. pada Tanggal 11 Juni 2011 silam. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (*eksekutif*) tak dapat berjalan sendiri melainkan harus berjalan beriringan dengan pihak DPRD (*legislatif*), pihak swasta (*investor*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada di daerah.

Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menyebutkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara kedua lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar (*checks and balances*), dan tidak saling mendominasi. Bahkan, seharusnya selalu saling mengisi dan mendukung satu sama lain dalam kerangka melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kesetaraan kedudukan dan kerjasama antar kedua lembaga pemerintahan ini akan semakin jelas tercermin dalam penetapan peraturan-peraturan daerah. Pihak *eksekutif* yang mengajukan dan legitimasinya berasal dari pihak *legislatif*. Pada kondisi yang lain, pihak *legislatif* akan bertindak sebagai penyeimbang dengan memberikan sumbang saran dan pemikiran bagi pihak pemerintah daerah. Sumbang saran dan pemikiran tersebut dilakukan dalam rangka memecahkan permasalahan maupun persoalan yang ada di Kabupaten Yalimo. Adanya saling memberikan saran dan pemikiran, maka dengan sendirinya akan tercipta *check and balances*. Jika kondisi ini diwujudkan maka antara *eksekutif* dan *legislatif* di kabupaten Yalimo dapat berjalan harmonis dan selaras. Sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan penuh dukungan serta perbaikan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah kabupaten Yalimo.

Salah satu program pemerintah kabupaten Yalimo yang menjadi sektor penting adalah Pendidikan. Sektor pendidikan memegang peran yang sangat vital bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Yalimo. Dikaitkan dengan pemahaman di awal, maka pendidikan setiap masyarakat baik di lingkup daerah maupun nasional mesti memiliki ideologi, yaitu keyakinan, nilai, cita-cita, visi, dan metode untuk meraihnya yang setia memajukan bangsa dan negaranya. Dalam rangka mengemban amanah tersebut maka diperlukan perencanaan perihal transformasi sumber daya manusia Kabupaten Yalimo yang ditopang oleh sektor pendidikan. Arah dan strategi transformasi tersebut merupakan panduan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia Yalimo yang maju dan setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka dirasa perlu untuk mengkaji program pendidikan Yalimo yang sudah dilaksanakan selama tahun 2015. Sehingga perlu dilakukan suatu evaluasi sejauh mana dan seberapa besar kemanfaatan yang didapatkan dari implementasi program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten Yalimo dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia masyarakat di Yalimo.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan observasi. Sumber data berasal dari fakta-fakta empirik melalui hasil observasi dan beberapa catatan (data sekunder) berupa dokumen RPJMD, LKPJ dan Resntra SKPD Dinas Pendidikan yang secara langsung mengesekusi implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Yahulimo. Data dianalisa secara deskriptif.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

- **Arah Kebijakan**

Pemerintah Kabupaten Yalimo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan arah kebijakan pendidikan tahun 2011 – 2016. Arah kebijakan tersebut antara lain meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Mengarahkan alokasi anggaran daerah untuk pelayanan pendidikan cuma-cuma bagi seluruh lapisan masyarakat Yalimo. Mengirim kader-kader muda Yalimo untuk menempuh pendidikan tinggi ke luar daerah. Mengembangkan pusat kegiatan belajar masyarakat (sekolah kampung) bagi orang dewasa Yalimo. Membangun pusat pelatihan keterampilan di tingkat kabupaten dan distrik. Melibatkan lembaga adat dan keagamaan (gereja) dalam pembangunan kualitas SDM Yalimo. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan *trainer*, baik untuk pendidikan formal maupun non formal. Arah kebijakan tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam visi-misi dan kemudian sebagai program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Yalimo yang berlangsung selama ini.

- **Visi-Misi**

Visi dinas pendidikan Kabupaten Yalimo adalah “Terwujudnya Pendidikan Yang Merata, Berkualitas, dan Berkearifan Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian dan Kemajuan Masyarakat Yalimo. Sedangkan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo adalah meningkatkan jumlah masyarakat Yalimo yang cakap membaca dan menulis. Meningkatkan jumlah masyarakat Yalimo yang dapat menempuh pendidikan sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Meningkatkan keahlian spesifik masyarakat Yalimo dalam bidang pertanian, agroindustri, dan kehutanan bagi sumber daya manusia di kabupaten Yalimo. Mengembangkan prakarsa (inisiatif) lokal masyarakat Yalimo dalam membangun wilayah/komunitas. Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Yalimo yang kokoh dari berbagai ekse negatif globalisasi dan pembangunan yang berorientasi kebendaan (materialisme).

- **Anggaran dan Isu Strategi**

Untuk anggaran, pemerintah kabupaten Yalimo telah menetapkan Alokasi dana APBD sekurang-kurangnya 20% untuk penyelenggaraan jaminan pendidikan. Pada DPA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah dianggarkan 20% dari APBD yang setara dengan Rp. 84.600.200.000,- (Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah. Pembagian alokasi dana tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 184.45/HKM/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKSKPD) Kabupaten Yalimo tahun 2015. Guna mengemban amanah pembangunan manusia dan pemajuan pendidikan maka perlu, komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Yalimo dalam menetapkan politik anggaran yang berorientasi pembangunan manusia. Secara rinci anggaran tersebut dirincikan pada tabel 1.

Tabel 1. Program, Kegiatan, Pagu Indikatif dan Sumber Dana  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Yalimo Tahun 2015

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.509.000.000	DAU
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	11.942.000.000	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	500.000.000	
4.	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	29.449.200.000	DAU, DAK,
5.	Program Pendidikan Mengengah	11.520.000.000	OTSUS
6.	Program Pendidikan Non Formal	3.020.000.000	
7.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	15.250.000.000	
8.	Program Non Fisik Pendidikan	10.410.000.000	DAU, OTSUS
JUMLAH :		84.600.200.000	

Sumber : Olahan data sekunder dari Kept. Bupati No. 18.45/HKM 2015 Renja SKPD Kab. Yalimo 2016

#### • Isu Strategi

Terdapat beberapa isu strategis yang sangat perlu untuk diseriusi oleh pemerintah kabupaten Yalimo. Isu strategis tersebut adalah ketersediaan tenaga guru, isu ketersediaan prasarana, sarana dan layanan sekolah, isu buta aksara, isu tuntas wajib belajar 9 tahun, isu kompetensi tenaga pendidik dan isu penguatan tata kelola manajemen sekolah.

#### *Ketersediaan tenaga guru*

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Yalimo dilakukan melalui bidang pendidikan formal. Saat ini pendidikan formal di Yalimo memerlukan perhatian serius dari Pemda Yalimo. Ketersediaan tenaga guru yang belum memadai di tiap-tiap distrik dan wilayah Kabupaten Yalimo menjadi perhatian serius. Kondisi masyarakat Yalimo pada saat sekarang ini telah menempatkan guru-guru memiliki peranan yang sangat vital bagi pemajuan pendidikan dan perikehidupan masyarakat Kabupaten Yalimo. Oleh karena itu perlu kebijakan insentif yang memadai bagi guru-guru yang bersedia ditempatkan pada wilayah-wilayah terisolir (pedalaman) di kabupaten Yalimo.

#### *Ketersediaan prasarana, sarana, dan layanan sekolah*

Prasarana berupa bangunan fisik sekolah yang memadai sangat menunjang pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik. Demikian halnya berbagai sarana dan layanan sekolah yang sangat berkaitan dengan efektifitas pembelajaran perlu

disediakan dengan memadai seperti halnya alat tulis, buku pelajaran, alat peraga, teknologi informasi/komunikasi, dan berbagai sarana penunjang lainnya. Oleh karena sangat dibutuhkan keseriusan pemda Yalimo untuk memenuhi ketersediaan prasarana, sarana, dan layanan sekolah.

#### *Buta Aksara*

Pendidikan keaksaraan merupakan program pendidikan dalam memberantas buta aksara supaya menjadi melek (huruf). Seorang dikatakan melek huruf jika orang tersebut tidak membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Pendidikan dasar berkaitan dengan kinerja pendidikan dsar bagi kelompok usia sekolah. Program ini dilakukan supaya tidak terjadi kelompok buta aksara baru baik sebagai akibat adanya anak-anak Yalimo usia 7 - 12 tahun yang tidak mendapatkan pendidikan dasar maupun putus sekolah pada pendidikan dasar. Selain pendidikan dasar, pendidikan keaksaraan juga diperuntukan bagi orang dewasa Yalimo untuk penduduk usia dewasa (15 tahun keatas). Indikator-indikator yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan keaksaraan diantaranya adalah angka melek dan pendidikan yang ditamatkan penduduk Yalimo.

#### *Tuntas Wajar 9 tahun*

Seiring dengan tuntutan daya saing dalam penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka program pemerintah berupa Tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang mewajibkan anak memiliki pendidikan dasar sampai sederajat SMP, nampaknya harus mulai ditingkatkan sampai sederajat SMA. Tuntutan tersebut, untuk Kabupaten Yalimo sangat disadari dapat diwujudkan, mengingat dukungan dari berbagai komponen dalam penyelenggaraan pendidikan sampai 12 tahun, secara bertahap mulai meningkatnya daya dukungnya. Penyediaan komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut, seperti telah tersedianya ruang kelas yang memadai dan sarana pendukung lainnya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya serap siswa.

#### *Kompetensi tenaga pendidik*

Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik adalah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Di samping itu, keduanya merupakan hal yang menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian, kondisi kedua hal tersebut masih belum memadai di kabupaten Yalimo. Misalnya saja guru yang harus berkualifikasi Sarjana (S1) sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen masih belum terpenuhi di tingkat sekolah kabupaten Yalimo.

#### *Penguatan tata kelola manajemen sekolah*

Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah sebagai satuan pendidikan memegang peranan penting sebagai pihak pemberi pelayanan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola manajemen yang efektif dan efisien, sehingga dapat memenuhi standar operasional pelayanan yang baik pada sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Yalimo. Dengan tata kelola manajemen sekolah yang tidak baik, akan berdampak pada

buruknya kinerja sekolah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pencitraan publik akan melemah terhadap sekolah tersebut. Sebaliknya, dengan tata kelola manajemen yang baik, akan memberi pencitraan publik yang bagus, karena sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sistem manajemen yang memenuhi asas tertib administrasi, transparan, akuntabel dan demokratis.

• **Implementasi dan Evaluasi Program Pendidikan**

Pembahasan hasil Implementasi dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan di kabupaten Yalimo didasarkan atas hasil pengolahan data sekunder terhadap isu strategis pendidikan, diantaranya ketersediaan tenaga guru, *Jumlah Murid, Ketersediaan prasarana, sarana, dan layanan sekolah, Kuantitas dan Kualitas Lulusan, Tuntas Wajar 9 tahun, Tuntas Buta Aksara, Kompetensi tenaga pendidik, dan Penguatan tata kelola manajemen sekolah*

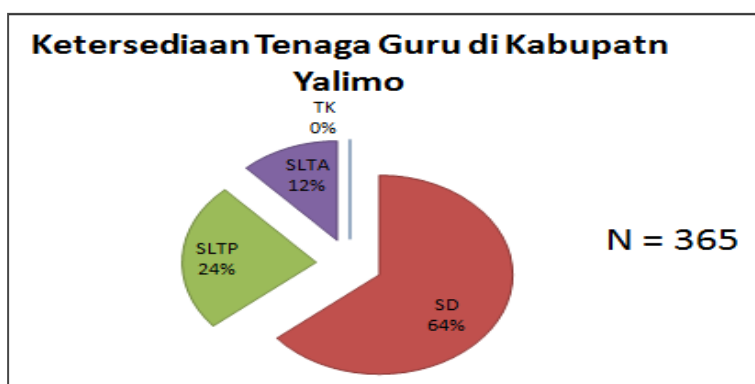
*Ketersediaan tenaga guru*

Tahun 2015 jumlah tenaga guru baik SD, SMP dan SMA yang tersebar di 5 distrik di Kabupaten Yalimo berjumlah 365 orang. Bila dirincikan maka diperoleh jumlah guru SD sebanyak 235 orang, SMP 107 orang dan SLTA yang terdiri dari SMK dan SMA berjumlah 33 orang. Jumlah sekolah, guru dan murid di kabupaten Yalimo tahun 2015 disajikan pada tabel 2. Sedangkan persentase ketersediaan guru di kabupaten Yalimo tahun 2015 disajikan pada grafik 1.

Tabel 2. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Kabupaten Yalimo Tahun 2015

No	Distrik	Jumlah Sekolah				Jumlah Guru				Jumlah Murid			
		SLTA	SMP	SD	TK	SLTA	SMP	SD	TK	SLTA	SMP	SD	TK
1	Welarek	2	4	9	-	2	27	28	-	159	665	1.688	-
2	Apalapsilli	1	3	8	-	1	20	25	-	53	218	985	-
3	Abenaho	3	6	17	-	17	35	51	-	203	566	2.125	-
4	Elalim	3	3	6	-	13	21	23	-	295	141	921	-
5	Benawa	-	2	8	-	-	4	8	-	-	75	650	-
Jumlah		9	18	48	-	33	107	235	-	610	1.665	6.389	-

Sumber : olahan data sekunder tahun 2015



Grafik 1. Persentase ketersediaan guru di Yalimo tahun 2015  
 Sumber : olahan data sekunder tahun 2015

Berdasarkan grafik 1, terlihat bahwa ketersediaan tenaga guru di Kabupaten Yalimo terdapat kesenjangan antara jenjang pendidikan TK dan SD. Dengan tidak tersedianya tenaga guru TK, maka kondisi ini berkontribusi terhadap minimnya kualitas peserta

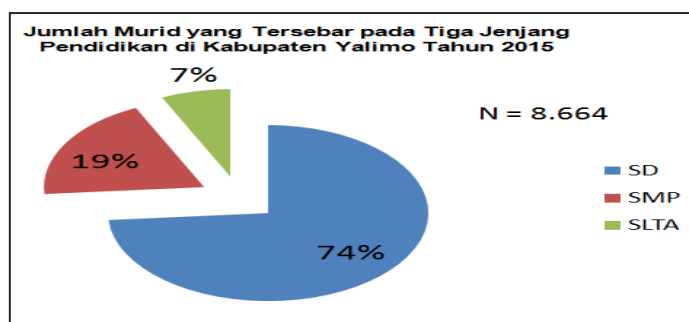


didik pada tingkat SD. Dasar pendidikan pada tingkat TK sangat mempengaruhi kesiapan siswa dalam menghadapi jenjang pendidikan SD. Begitu pula dengan jumlah tenaga guru SD. Meskipun jumlah tenaga guru SD menempati posisi tertinggi namun rasio guru terhadap murid sangat tidak ideal. Rasio guru terhadap murid adalah 1 : 40, artinya satu orang guru mendidik 40 orang siswa. angka idealnya adalah 1 : 21, yang artinya satu orang guru mendidik 21 orang siswa. Dengan demikian pemerintah daerah Yalimo perlu untuk melakukan perekrutan tenaga guru sebanyak 50% dari jumlah yang ada. Selain itu gaji guru kontrak cukup memprihatinkan. Berdasarkan data sekunder, ditemukan bahwa setiap guru digaji Rp. 1.700.000 per bulan tanpa memperhatikan tingkat kemahalan di wilayah tersebut bahkan dibawah upah minimum Papua.

### Jumlah Murid

Berdasarkan tabel 2, ditampilkan data jumlah murid pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SLTA yang tersebar pada 75 sekolah di kabupaten Yalimo berjumlah 8.664 murid. Untuk persentase jumlah murid tiap tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik 2.

Grafik 2. Persentase Jumlah Murid Tiap Tingkat Pendidikan Kabupaten Yalimo Tahun 2015



Sumber : Olahan data Sekunder tahun 2015

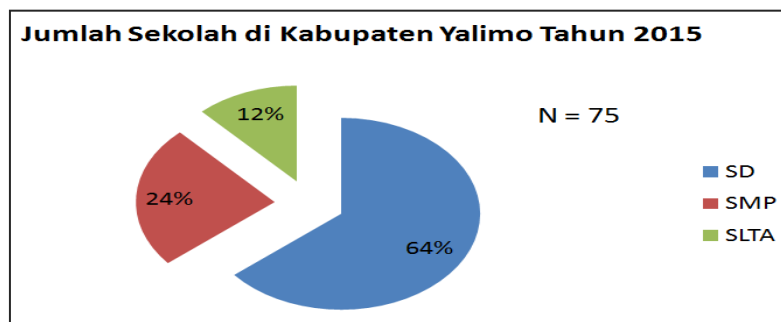
Indikator sederhana yang dapat menunjukkan mutu pendidikan adalah rasio guru dan murid. Perbandingan antara guru terhadap jumlah murid sebagai jenjang pendidikan tertentu memiliki standar. Standart ideal murid guru adalah 1 : 40 untuk SD. Dan rasio guru dan murid 1 : 21 untuk SMP dan SLTA. Berdasarkan standar rasio tersebut, maka jika dirasioikan antara guru-murid maka pada jenjang pendidikan SD di kabupaten Yalima akan diperoleh rasion murid yaitu 48,65. Artinya satu orang guru di Yalimo akan mendidik sekitar 48-49 murid. Sedangkan untuk rasio murid guru SMP di Yalimo adalah sebesar 15,24. Artinya satu orang guru SMP di Yalimo akan mendidik sekitar 15 orang murid. Dan untuk rasio guru-murid SLTA di Yalimo adalah sebesar 17,22. Artinya satu orang guru SLTA di Yalimo akan mendidik sekitar 17 orang siswa SMA.

Bila dibandingkan dengan kondisi ideal diatas, maka dapat dikatakan bahwa rasio guru murid di Kabupaten Yalimo telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk jenjang pendidikan menengah namun. Namun tidak untuk jenjang pendidikan dasar. Sehingga diperlukan perhatian yang lebih dari pemerintah Kabupaten Yalimo agar rasio guru murid pada jenjang pendidikan dasar dapat memenuhi kondisi yang ideal. Karena hal tersebut berhubungan dengan efektivitas proses PBM terutama penyampaian materi di kelas.

*Ketersediaan prasarana, sarana, dan layanan sekolah*

Berdasarkan tabel 2, didapatkan data bahwa ketersediaan sarana pendidikan berupa gedung sekolah di kabupaten Yalimo telah tersebar pada 5 Distrik yang berjumlah 75 bangunan sekolah. Jumlah tersebut terdiri dari 9 gedung sekolah SLTA, 18 gedung sekolah SMP dan 48 gedung SD. Persentase ketersediaan gedung sekolah di kabupaten Yalimo ditampilkan pada grafik 3.

Grafik 3. Persentase ketersediaan Gedung Sekolah di Kabupaten Yalimo Tahun 2015



Sumber : Olahan data sekunder tahun 2015

Berdasarkan grafik 3, dapat dikatakan dikatakan bahwa ketersediaan prasarana, sarana dan layanan sekolah seperti gedung sekolah sudah terbangun. Hal ini ditunjukkan pada data grafik 2 bahwa sebanyak 64% gedung sekolah di kabupaten Yalimo adalah Sekolah Dasar. Ketersediaan sarana pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan jumlah penduduk usia sekolah. Kebutuhan akan adanya sarana layanan pendidikan sebagaimana tertera diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia Sekolah Dasar (SD) cukup tinggi sehingga kebutuhan akan adanya jumlah sekolah dasar pun meningkat.

*Kuantitas dan Kualitas Lulusan*

Secara kuantitas pelaksanaan layanan pendidikan baik di tingkat SD, SMP dan SLTA sangat berhasil. Hal ini ditandai dengan adanya jumlah lulusan di tahun 2015 rata-rata mencapai 100%. Dengan kata lain, pemerintah daerah berhasil memenuhi standart pelayanan secara baik berkaitan pula dengan standar kelulusan yang ditentukan secara nasional karena ujian akhir nasional dilakukan secara nasional dan serentak di seluruh indonesia. Jumlah peserta ujian dan lulusan pada jenjang pendidikan di kabupaten Yalimo ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Peserta Ujian Nasional dan lulusan pada Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Yalimo 2015

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta	Jumlah Lulusan	Persentasi kelulusan
1	SD	597	597	100%
2	SMP	275	275	100%
3	SLTA	128	128	100%
	Jumlah	1600	1600	100%

Sumber : Olahan Data Sekunder Tahun 2015



Secara kuantitas jumlah tersebut telah memenuhi target pencapaian namun perlu diingat bahwa kuantitas perlu pula diimbangi dengan kualitas yang memadai. Artinya layanan pendidikan khususnya peran guru-guru dalam menyiapkan peserta didik dalam rangka menghadapi ujian nasional berhasil dilakukan secara maksimal. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Yalimo melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran mengalokasikan dana sebesar Rp. 700.000.000 yang bersumber dari dana OTSUS untuk membiayai kegiatan *try out* ujian nasional dan penyusunan soal ujian sekolah di 42 sekolah (SD, SMP dan SLTA). Selain itu sarana dan prasarana penunjang layanan yang tersediapun berkontribusi positif terhadap keberhasilan dimaksud. Namun ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas lulusan perlu didiskusikan lebih lanjut. Untuk lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ada sejumlah keluhan di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta terkait dengan kualitas lulusan terutama di wilayah pedalaman papua.

Atas dasar kebijakan afirmasi, siswa-siswa tersebut diluluskan melalui jalur seleksi nilai raport. Namun dalam perjalanan studinya ternyata siswa tersebut tidak mampu memenuhi standart Indeks Prestasi Relatif (IPR) minimal (2,75) setiap semesternya. Sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah jurusan atau pindah program studi dan banyak pula yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena tidak mampu.

#### *Tuntas Wajar 9 tahun*

Perhatian pemerintah daerah kabupaten Yalimo pada program wajib belajar 9 tahun cukup tinggi. Secara keseluruhan program wajib belajar 9 tahun menelan dana sekitar Rp. 29.449.200.000 atau sekitar 34,80% dari Rp. 84.600.200.000 atau 20% APBD Kabupaten Yalimo. Dana tersebut digunakan untuk belanja jasa dan belanja fisik dalam rangka mewujudkan program wajib belajar sembilan tahun dimaksud.

Untuk menyatakan bahwa program wajib belajar sembilan tahun ini berhasil tidak dikur melalui penyerapan anggaran hingga mencapai 100% namun manfaat program tersebut tepat sasaran dan sejumlah keberhasilan dari program tersebut dapat terukur. Misalnya penyediaan tenaga guru kontrak sebanyak 148 orang yang digaji Rp. 1.700.000 per bulan selama 12 bulan sehingga pagu indikatif untuk kegiatan penyiapan tenaga guru kontrak daerah ini sebesar Rp. 3.019.200.000.

Kegiatan ini dipastikan penyerapan anggaran mencapai 100% karena merupakan program rutin pada tahun berkenaan, yang menjadi persoalan adalah apakah guru-guru kontrak tersebut berkualitas sehingga berdampak pada kualitas lulusan ? atau berkomitmen meningkatkan kualitas lulusan meskipun hanya dengan upah sebesar Rp. 1.700.000 perbulan di medan tersulit seperti itu ?, inilah catatan-catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mewujudkan dan meningkatkan layanan pendidikan yang lebih baik lagi.

#### *Tuntas Buta Aksara*

Program pemberantasan buta huruf di Kabupaten Yalimo mulai mengalami peningkatan ke arah yang diharapkan. Meskipun peningkatan tergolong lambat, persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun keatas) yang melek kian bertambah. Jika

pada tahun 2013 angka melek huruf sebesar 67,08 persen tahun 2014 meningkat menjadi 69,10 persen dengan kata lain masih terdapat 30,90 persen penduduk yang masih buta aksara.

#### *Kompetensi tenaga pendidik*

Pada tahun 2015 kegiatan kompetensi tenaga pendidik ter *cover* dalam program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Program tersebut diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kualifikasi tenaga pendidik PGSD di Timika. Dengan alokasi dana yang bersumber dari dana OTUS sebesar Rp. 1.700.000.000,-. Penyerapan anggaran terhadap kegiatan tersebut sangat baik karena 100% dana tersebut digunakan membiayai program dan kegiatan tersebut.

Yang menjadi permasalahan adalah, apakah dengan terserapnya dana tersebut, apa dampaknya bagi kualitas pendidikan terutama kualitas lulusan pada semua jenjang pendidikan?, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut tidak dilihat dari jumlah lulusan yang dihasilkan, namun kualitas siswa tersebut pada jenjang pendidikan berikutnya terutama lulusan SLTA yang selalu menjadi sorotan bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di dalam dan luar papua.

#### *Penguatan tata kelola manajemen sekolah*

Penguatan tata kelola manajemen sekolah dilakukan melalui kegiatan pelatihan manajemen kepala sekolah dan berlangsung di Distrik Elalim. Kegiatan tersebut diikuti oleh 74 Kepala Sekolah dengan jumlah dana sebesar Rp. 250.000.000,- yang bersumber dari dana OTSUS. Kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan penataan manajemen sekolah hal ini ditandai dengan adanya peencanaan kegiatan PBM yang berjalan sesuai jadwal ujian nasional dan berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga dapat memenuhi standar operasional pelayanan yang baik di Kabupaten Yalimo.

## **4. Penutup**

### **• Kesimpulan**

Dari segi penyerapan anggaran, implementasi program pendidikan di Kabupaten Yalimo cukup baik namun program kegiatan yang dilakukan belum mencapai titik yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat melalui terbatasnya jumlah tenaga guru khusus pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Bahkan pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) tidak ada sama sekali. Hal ini pun berdampak pada tidak tersedianya murid TK. Sehingga kesiapan peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan SD menjadi tidak sempurna. Dampak berikutnya adalah ketersediaan prasarana sarana, dan layanan sekolah yang hanya berfokus pada ruang belajar dan tidak tersedianya perpustakaan dan sarana lainnya. Dampak lainnya adalah kuantitas lulusan yang tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk program tuntas wajar sembilan tahun, tuntas buta aksara, kompetensi tenaga pendidik serta penguatan tata kelola manajemen sekolah berjalan sesuai arah kebijakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

- **Rekomendasi**

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan adalah penyerapan anggaran agar disertai dengan manfaat dari setiap program pembangunan yang ada. Pemerintah daerah kabupaten Yalimo melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran perlu membuat rasio guru terhadap murid untuk memastikan jumlah tenaga guru yang dibutuhkan. Terutama pada jenjang pendidikan SD. Selain itu juga perlu direkrutnya guru TK sebagai sumber daya untuk mempersiapkannya pada jenjang pendidikan SD.

Selain ketersediaan prasarana sarana, dan layanan sekolah perlu pula menyiapkan perpustakaan dan sarana lainnya sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan dimaksud. Kuantitas lulusan perlu diimbangi dengan kualitas yang memadai dengan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Sedangkan untuk program tuntas wajar sembilan tahun, tuntas buta aksara, kompetensi tenaga pendidik serta penguatan tata kelola manajemen sekolah berjalan perlu ditingkatkan sehingga lebih naik lagi.

## **5. Daftar Pustaka**

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Yalimo, 2015, Kabupaten Yalimo dalam Angka.
- Kendi, Kristofol Ibrahim, 2016, Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua, Yayasan Emereuw Sentani Papua.
- Keputusan Bupati Nomor 184.45/HKM/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKSKPD) Kabupaten Yalimo tahun 2015.
- Modouw James, 2013, Pendidikan dan Peradaban Papua, Suatu Tinjauan Kritis Transformasi Sosial, Bajawa Press Yogyakarta.
- Nugroho Riant, 2014, Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan (Edisi Ke 5), Alex Media, Komputindo Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, Metode Penelitian Kebijakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Paul Bobenz Mark dan Kuipers Saneke Hart T, 2015, Politik Evaluasi Kebijakan, Dalam Michel Moran, Marthin Rein dan Robert E. Goodin : Handbook Kebijakan Publik, (*Handbook of Public Policy*), Nusa Media Bandung.
- Pulzl Helga dan Treib Oliver, 2015, Implentasi Kebijakan Publik, Dalam Ficher Frank, Miller J. Gerald dan Sidney S. Mara : Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori Politik dan Metode (*Handbook of Public Policy, Politic and Methods*), Nusa Media Bandung.
- Winarno Budi, 2016, Kebijakan Publik di Era Globalisasi, Teori dan Proses, Studi Kasus Komparatif, CAPS, Yogyakarta.